

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 dapat diselesaikan dan disampaikan dalam upaya memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ini. Laporan ini menyajikan gambaran tentang capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan UMKM. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Dengan demikian diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Maret 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Isu – Isu Strategis	1
C. Struktur Organisasi.....	1
D. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran.....	19
C. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN I : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun Anggaran 2023.....	44
LAMPIRAN II : Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) Tahun Anggaran 2023.....	49
LAMPIRAN III : Rencana Kerja Tahunan	50
LAMPIRAN IV : Perubahan Perjanjian Kerja.....	51
LAMPINRAN V : LHE.....	53
LAMPIRAN VI : E-Monev.....	54
LAMPIRAN VII : SK IKU	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan dilandasi pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan menyajikan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun anggaran 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Keberhasilan di bidang pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terkait serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam usaha ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM merupakan tujuan utama dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa keberhasilan yang dapat antara lain adalah :

1. Peningkatan kinerja pelayanan publik terutama di bidang konsultasi mengenai perkoperasian dan UMKM. Muara dari perbaikan pada aparatur negara adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, bahwa peningkatan kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini

- telah menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Terbinanya koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir baik melalui pembinaan langsung maupun melalui diklat yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM yang nantinya diharapkan dapat bersaing dalam pasar global.
 3. Tersusunnya Data Keragaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hilir yang diharapkan nantinya dapat membantu dalam melakukan pembinaan – pembinaan serta informasi mengenai perkoperasian di Kabupaten Rokan Hilir.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Walaupun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi organisasi belum sepenuhnya mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan lebih disempurnakan lagi perumusan indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Dinas Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2024 ini kami susun untuk menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan.

Bagansiapiapi, Maret 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu unsur Pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka membantu tugas daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

B. Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam rencana strategis yang berdasarkan atas isu – isu strategis yang meliputi :

1. Pengurus / pengelola koperasi masih perlu terus ditingkatkan lagi, baik dalam hal organisasi, manajerial maupun pengetahuan tentang perkoperasian dan wisausaha.
2. Penguasaan informasi pasar seta perluasan pemasaran produk.
3. Peningkatan etos kerja koperasi.
4. Mencari tenaga teknis untuk membina koperasi agar berkembang
5. Mengoptimalkan koperasi secara nyata.

C. Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang telah disusun sebagai target kinerja setiap tahunnya, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang dibidang Koperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi :

- a) Melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b) Pengorganisasian, pelayanan umum dan teknis, pengendalian, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan lapangan, pembiayaan, penelitian dan pengkajian, serta pelaporan.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Bidang Koperasi
- d) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- e) Bidang Kelembagaan
- f) UPT
- g) Kondisi Strategis

1. Eksternal

Dalam rangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel maka perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) beberapa hal yang harus di perhatikan yakni

adanya perubahan peraturan yang mengharuskan Dinas Koperasi UMKM Daerah untuk melaksanakan kegiatan seperti reviu DAK. Dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terhadap pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas perjanjian/kontrak/perikatan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran. Selain itu Dalam upaya menindaklanjuti tuntutan masyarakat terhadap kinerja Dinas Koperasi UMKM sebagai unsur pengawasan maka Dinas Koperasi UMKM Daerah Kabupaten Rokan Hilir bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APD) dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Sapu Bersih (SABER PUNGLI) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pengendalian pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memandatkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi UMKM Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dan Korsupgah serta Pengendalian Gratifikasi. Selain itu Dinas Koperasi UMKM Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih menindaklanjuti kebijakan/program nasional dalam hal Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

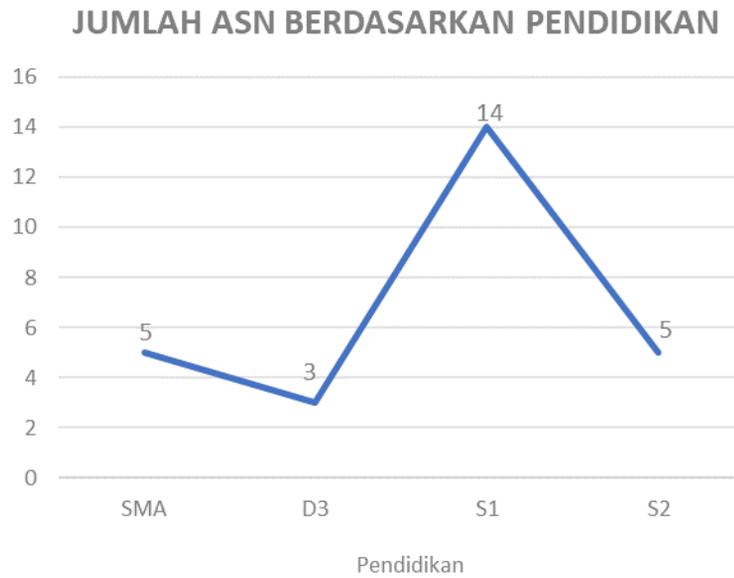
2. Internal

a. Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Perkembangan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi UMKM Daerah Kabupaten Rokan Hilir per 31 Desember 2024

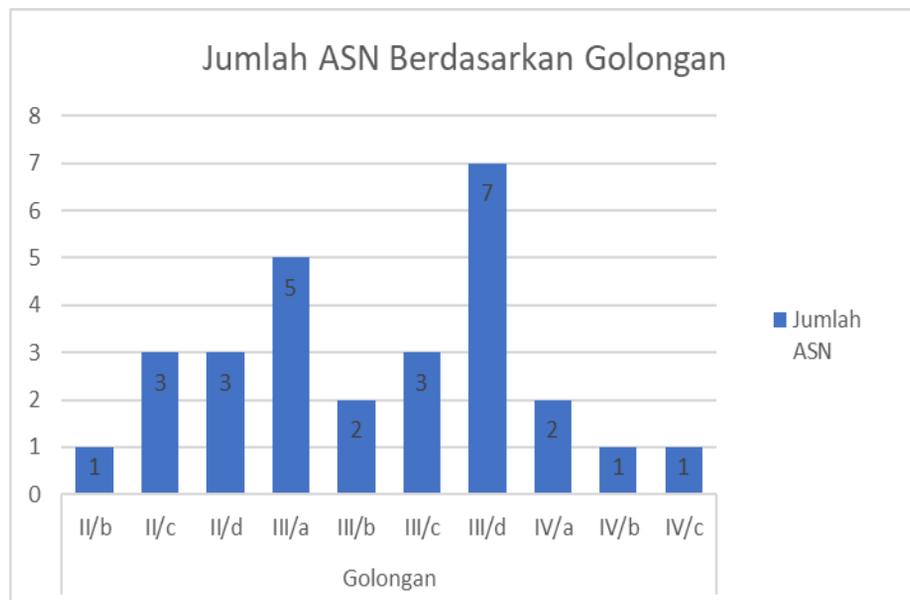
Jumlah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada grafik yang disajikan dibawah, sebagai berikut :

Grafik I.1 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.



Untuk jumlah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 berdasarkan tingkat Golongan sebagai berikut :

Grafik I.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.



Sedangkan jumlah ASN yang bertugas di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 berjumlah 27 orang dengan jumlah ASN wanita sebanyak 16 orang dan ASN laki-laki sebanyak 11

orang, dan untuk ASN yang menduduki jabatan berdasarkan tingkat Eselon, antara lain :

- a) Eselon II berjumlah 1 orang
- b) Eselon III berjumlah 4 orang
- c) Eselon IV berjumlah 1 orang
- d) Pejabat Fungsional berjumlah 6 orang

Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi penyusunan konsep berkaitan pedoman dan petunjuk teknis kkk tentang administrasi, produser kerja, koordinasi dan mekanisme hubungan kerja;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan program kerja dengan berpedoman kepada program kerja tahunan yang lalu sesuai dengan petunjuk pimpinan;
- 3) Penyelenggaraan hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal;
- 4) Penganalisaan kebijakan / program – program kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang akan disusun menjadi program kerja dinas;
- 5) Penghimpunan peraturan perundang – undangan, petunjuk dan pedoman kerja, buku – buku, bulletin / majalah dan bahan lainnya di bidang kepegawaian, hubungan masyarakat, keuangan dan perencanaan program;
- 6) Pengkoordinasian permasalahan tentang rencana kerja, ketatausahaan, hubungan masyarakat, keuangan perencanaan program serta perlengkapan;
- 7) Pengevaluasian pelaksanaan tugas sub bagian melalui koordinasi dan evaluasi terhadap data yang masuk untuk bahan kajian dan pembinaan

serta penyusunan perencanaan kedepannya;

- 8) Penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan program serta perlengkapan;

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perkoperasian dan Usaha Koperasi di daerah. Bidang Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan rencana dan program operasional pembinaan koperasi;
- 2) Penyusunan pedoman penyuluhan tentang kebijakan usaha koperasi;
- 3) Penjabaran petunjuk teknis pembinaan koperasi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan unit lain dan instansi sectoral terkait dalam rangka pembinaan koperasi;
- 5) Pengevaluasian hasil penelaahan Bidang Koperasi tentang permohonan bantuan koperasi untuk pengembangan usaha;
- 6) Pemantauan pelaksanaan perkembangan pembinaan usaha koperasi;
- 7) Pengevaluasian laporan kegiatan dan pembinaan usaha koperasi;
- 8) Pengkoordinasian penyusunan program kerja di Bidang Koperasi, merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi;
- 9) Pengkoordinasian dan mengadakan rapat berkala dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 10) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja instansi lainnya dalam rangka pengembangan koperasi;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang;
- 12) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama, bantuan dalam rangka peningkatan peranan dan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bidang UMKM mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Fasilitas peningkatan usaha kerjasama Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pihak Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dalam pengembangan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan dan bimbingan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Rokan Hilir;
- 5) Pengevaluasian pelaksanaan program pengembangan, pembinaan dan bimbingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Pengkoordinasian rapat staf dalam rangka pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 7) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lainnya;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Bidang Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab menyelenggaraan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan terhadap Kelembagaan Koperasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang UMKM mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penyuluhan perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan penyuluhan usaha simpan pinjam serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Pengkoordinasian, pembimbingan / pengarahan metode dan melaksanakan program penyuluhan tentang Undang – Undang / Peraturan dan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan koperasi simpan pinjam, permodalan dan jasa keuangan, akuntabilitas koperasi dan promosi;
- 4) Pelaksanaan penilaian kebutuhan modal usaha bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Pelaksanaan penilaian terhadap akuntabilitas koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6) Pengkoordinasian rapat berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tuags;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
- 8) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami sedikit permasalahan khususnya pada sektor SDM atau ASN yang bertempat tugas di Dinas Koperasi dan UMKM. Ada beberapa jabatan fungsional yang masih kosong dan kekurangan staf di beberapa bidang serta minimnya sarana prasana kantor terutama komputer dan printer sehingga mengurangi hasil kinerja dari suatu bidang bahkan mempengaruhi kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

D. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Bagian ini menjelaskan tugas pokok, wewenang dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

B. Isu-isu Strategis

Uraian tentang kebijakan-kebijakan pokok dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dibahas pada bagian ini.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diuraikan pada bagian ini sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

D. Sistematika Penyajian

Dalam sistematika penyajian diuraikan bagaimana tata letak dan urutan serta sifat dari penyusunan Lakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Bagian ini menguraikan secara ringkas visi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Misi

Bagian ini menjelaskan secara ringkas misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian

Uraian tentang tujuan, sasaran dan cara pencapaian atas visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan pada bagian ini.

B. Rencana Kinerja

1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024.

Penjelasan atas sasaran kinerja tahun 2024 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir diuraikan dalam bagian ini.

2. Penetapan Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja diuraikan dalam pembahasan ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja atas kegiatan tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan pada bagian ini.

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran

Analisis dan evaluasi kinerja sasaran diuraikan pada bagian ini.

C. Realisasi Anggaran

Penjelasan terhadap realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 diuraikan dalam bagian ini.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Pernyataan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang hendak diwujudkan berikut ini;

“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”

Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut :

a) Maju

Bermakna dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.

b) Religius

Bermakna dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.

c) Berbudaya

Bermakna dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

d) Infrastruktur

Bermakna dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

e) Perekonomian

Bermakna dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka di tetapkan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut ini :

a) Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir.

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

b) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

c) Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

d) Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

e) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi tersebut di atas, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah termasuk pada Misi ke 4 yang berbunyi “Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan berkelanjutan” dan Misi ke 5 yang berbunyi “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi” sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

3. Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian

Adapun tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan visi dan misi yang harus konsisten dengan tugas dan fungsi suatu organisasi, oleh karena itu indikator kinerja tujuan harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai. Dengan demikian berpengaruh pada cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan misi.

Tujuan pembangunan koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern;
- b) Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global;
- c) Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Guna Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas KUMKM

Sasaran Pembangunan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kualitas Koperasi;
- b) Meningkatnya Produktivitas Koperasi;
- c) Meningkatnya UMKM yang Mempunyai Legalitas dan Bersertifikat;
- d) Meningkatnya Kuantitas (jumlah) UMKM;
- e) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas KUMKM.

Sasaran kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

B. Rencana Kinerja

Rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2024 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.

1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan tahapan-tahapan berikut ini:

a) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai tahun 2024 seperti dijelaskan dalam rencana strategis, dengan memperhatikan anggaran yang tersedia tahun 2024. Sasaran strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Untuk lebih jelasnya dalam dilihat pada Lampiran II.

b) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Lampiran I Pengukuran Kinerja Kegiatan diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

2. Penetapan Target Kinerja

Penetapan Target Kinerja merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur atau penilaian keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

a) Indikator Kinerja Utama

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UMKM

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi sehat	7.74%	7.99%	8.47%	8.95%	9.68%
			Persentase koperasi aktif	78.54 %	79.71%	81.39%	83.33%	85.50 %
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah omzet usaha (Rupiah)	Rp. 145 M	Rp. 147 M	Rp. 151 M	Rp. 158 M	Rp. 160 M
2	Terwujudnya UMKM Berdaya Saing Global	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	65	70	72	75	80
			Jumlah UMKM (Unit)	24.003	25.003	26.003	27.003	28.003
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

b) Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat tugas dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adanya perjanjian kinerja membuat terbentuklah komitmen antara penerima manah dan kesepakatan dengan pemberi amanah yang bertujuan untuk mengukur kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dari penerima. Berikut tabel dari perjanjian kinerja pejabat Eselon II Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	8,47%
		Persentase Koperasi Aktif	81,39%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 151 M
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	72 Unit
		Jumlah UMKM (Unit)	26.003 Unit
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam mencapai dan mewujudkan Indikator Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II, Dinas Koperasi dan UMKM didukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program / kegiatan sebesar Rp. 7.089.923.251,- dan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 6.540.223.001,- (92.25%)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program / kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Dalam tahun anggaran 2024 pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir meliputi pengukuran kinerja atas capaian kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja sasaran strategis merupakan capaian yang dihasilkan dengan membandingkan rencana indikator kinerja, sasaran strategis yang direncanakan dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang dapat dicapai. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan indikator *input*, *output*, dan *outcome* yang direncanakan dengan indikator *input*, *output*, dan *outcome* yang dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Pada tahun anggaran 2024, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir meliputi 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dengan 6 (enam) indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan MENPAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, indikator kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing kegiatan. Walaupun demikian ada juga permasalahan yang dihadapi dalam menghitung capaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung capaian indikator outcome yang dipakai. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang sulit dalam menentukan data kinerjanya, pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan persentase dengan dasar pemikiran bahwa kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya.

Sementara itu indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, diperlukan tenaga dan dana yang cukup besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran di gunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Indikator Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BB)
2.	Lebih dari 75 s.d 99%	Baik
3.	55% s.d 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

$$\text{Rumus Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Target Kegiatan}} \times 100\%$$

Tabel III.I Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	8,47%	3,9%	46,04%
		Persentase Koperasi Aktif	81,39%	82,5%	100%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 151 M	Rp. 286.164.297.724	100%
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	72	120	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	26.003	42.305	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

B. Analisis dan Evaluasi Kinerja Sasaran

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi

Sasaran strategis meningkatkan kualitas koperasi terdiri dari dua indikator tujuan/sasaran yaitu persentase jumlah koperasi sehat dan jumlah koperasi aktif. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Sasaran Strategis 1 UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	8,47%	3,9%	46,04%
		Persentase Koperasi Aktif	81,39%	82,5%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.3 Capaian Kinerja Strategis 1 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	100%	81.10 %	46,04%
		Persentase Koperasi Aktif	n/a	100%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

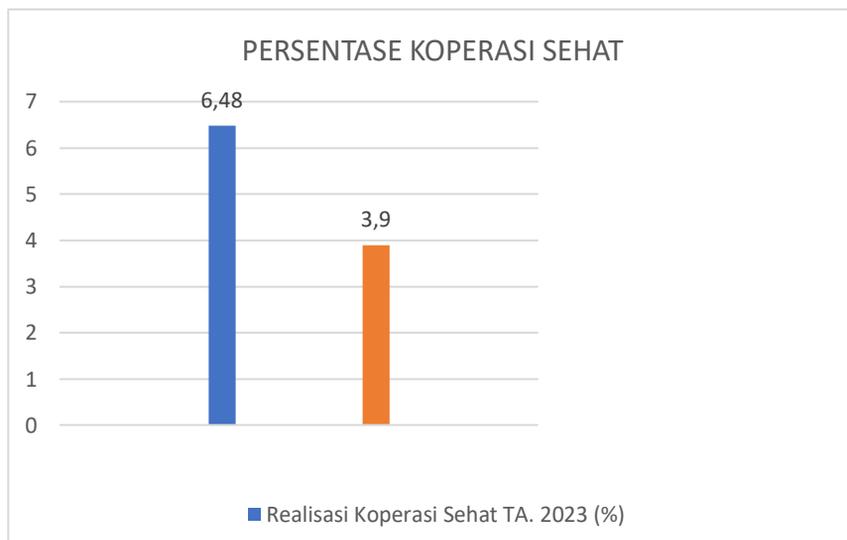
Tabel III.4 Capaian Kinerja Strategis 1 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	CAPAIN %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	9,68%	3,9%	46,04%
		Persentase Koperasi Aktif	85,50%	82,5%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

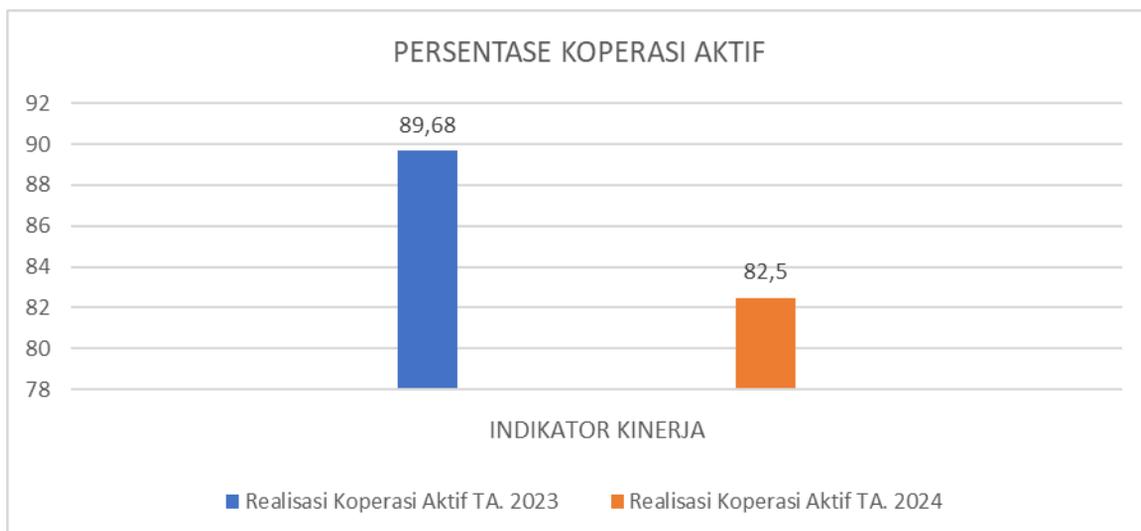
Grafik perbandingan antara realiasi persentase koperasi sehat tahun 2024 dan realisasi persentase koperasi sehat tahun 2024 sebagai berikut :

Gambar Grafik III.1 Persentase Koperasi Sehat



Berdasarkan grafik persentase koperasi sehat terjadi penurunan realisasi persentase koperasi sehat dikarena kurangnya anggaran pendukung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan koperasi.

Gambar Grafik III.2 Persentase Koperasi Aktif



Berdasarkan grafik persentase koperasi aktif terjadi peningkatan realisasi yang disebabkan meningkatnya pembentukan koperasi baru di Kabupaten Rokan Hilir, selaras dengan hal tersebut makanya terjadi pula peningkatan koperasi aktif di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Meningkatkan Produktivitas Koperasi

Sasaran strategis meningkatkan produktivitas koperasi dengan indikator tujuan/sasaran jumlah pertumbuhan omzet usaha. Dapat diuraikan bahwa pertumbuhan omzet usaha koperasi seiring dengan penambahan jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sebanyak 513 unit bertambah 19 unit dari tahun 2024 sebanyak 494 unit. Terdiri dari 423 unit koperasi aktif dan koperasi tidak aktif tahun 2024 berjumlah 90 unit.

Target omzet usaha/volume usaha pada tahun 2024 sebesar Rp. 186.531.077.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 286.164.297.724,- dengan peningkatan sebesar Rp 99.633.220.124,- dari target. Dengan demikian, maka pertumbuhan omzet usaha koperasi pada tahun 2024 sebesar 100 %.

Tabel III.5 Sasaran Strategis 2 UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Pertumbuhan omzet Usaha (Rupiah)	151 M	286,164,297,724	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.6 Capaian Kinerja Strategis 2 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	100%	81,10%	46,04%

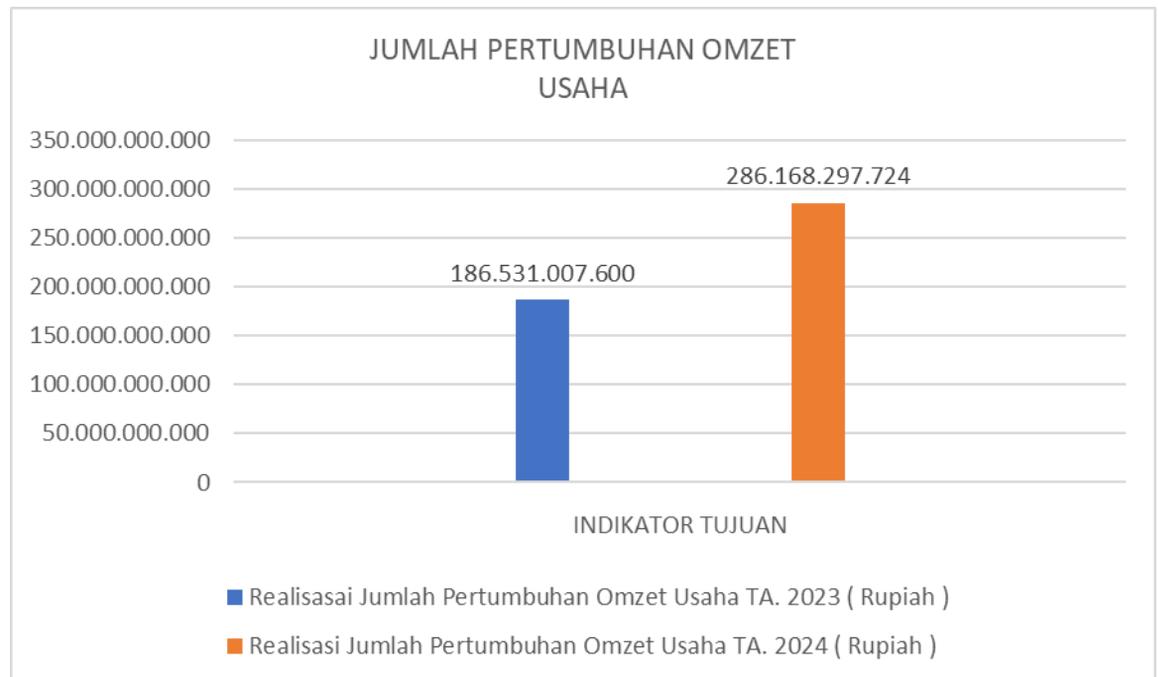
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel III.7 Sasaran Strategis 2 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Pertumbuhan omzet Usaha (Rupiah)	160 M	286,164,297,724	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Grafik perbandingan antara realiasi persentase koperasi sehat tahun 2023 dan realisasi persentase koperasi sehat tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan minimnya anggaran yang mendukung untuk tercapainya sasaran dari indikator tujuan tersebut, berikut grafiknya antara lain



Gambar Grafik III.3 Jumlah Pertumbuhan Omzet Usaha

3. Sasaran Strategis Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing.

Untuk sasaran strategis meningkatkan UMKM yang berdaya saing dengan indikator tujuan/sasaran yakni jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya dengan target kinerja sebanyak 72 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan dari data base UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat sebanyak 87 unit

(100%) dengan peningkatan sebanyak 17 unit dari target. Dari kinerja ini dapat dilihat bahwa berkembangnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun di Kabupaten Rokan Hilir cukup meningkat, hal ini ditandai dengan meningkatnya aktifitas ekonomi. Sedangkan untuk indikator tujuan/sasaran jumlah UMKM dengan target pada tahun 2024 sebesar 26.003 unit. Realisasi untuk tahun 2024 jumlah UMKM di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 35.068 unit. Meningkat sebanyak 10.065 unit dari target (100%).

Tabel III.8 Sasaran Strategis 3 UMKM Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya UMKM yang Bedaya Saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	72	120	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	26.003	42.305	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Tabel III.9 Capaian Kinerja Strategis 3 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya UMKM yang Bedaya Saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	n/a	100%	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	n/a	100%	100%

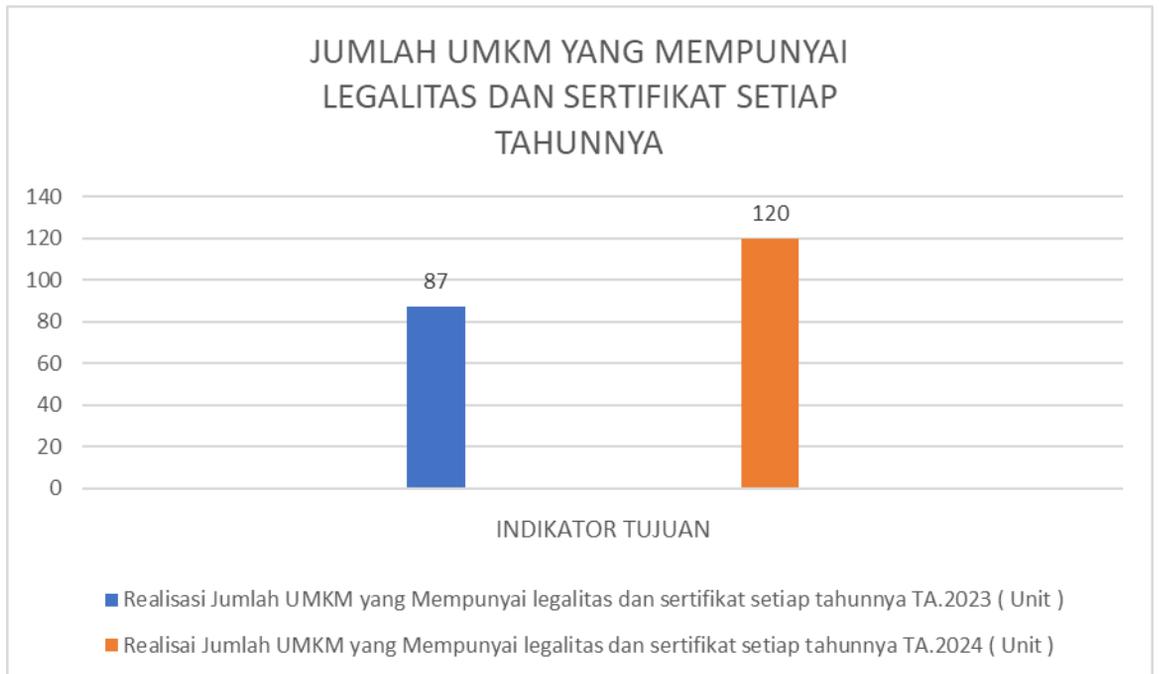
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Tabel III.10 Capaian Kinerja Strategis 3 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis.

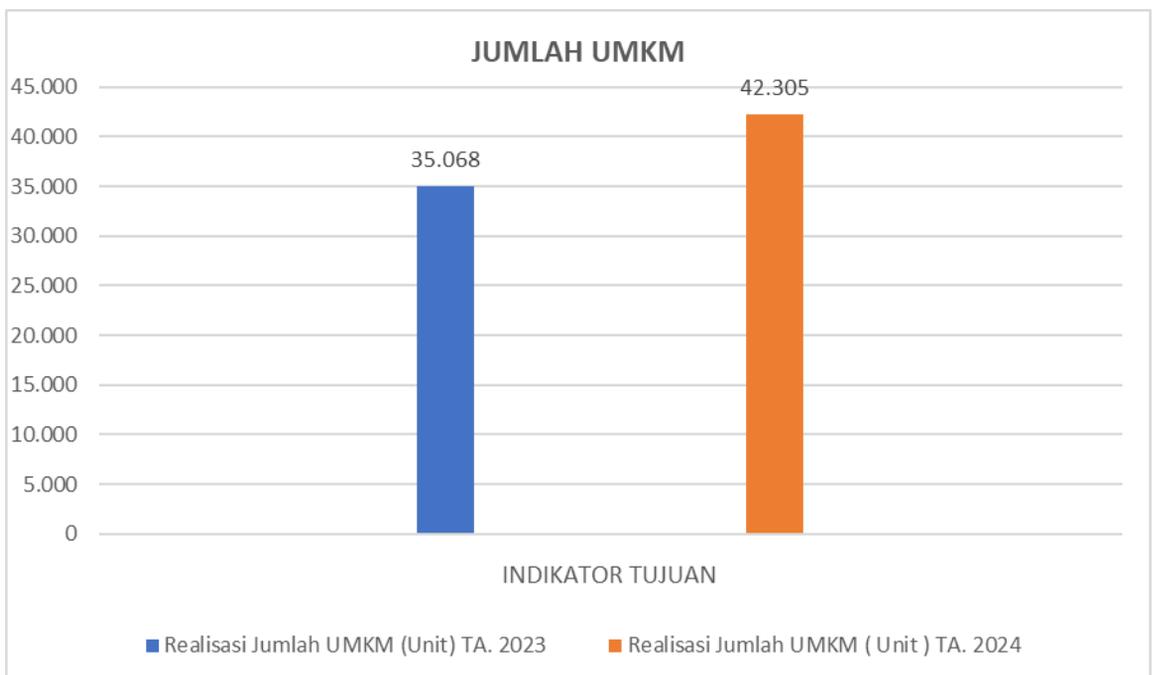
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya UMKM yang Bedaya Saing	Jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	72	120	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	26.003	42.305	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Gambar Grafik III.4 Jumlah UMKM Yang Mempunyai Legalitas dan Sertifikat



Gambar Grafik III.5 Jumlah UMKM



Berdasarkan grafik jumlah UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat yang disajikan, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah UMKM yang memiliki legalitas dan sertifikat disebabkan minimnya dukungan anggaran yang tersedia di Dinas Koperasi dan UMKM. Sedangkan untuk grafik jumlah UMKM terjadi peningkatan karena meningkatnya jumlah pelaku usaha yang membuka usaha baru dan mengurus izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, tetapi semakin tingginya jumlah UMKM tidak diseras dengan anggaran yang diberikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas KUMKM

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Nilai AKIP OPD. Adapun laporan hasil Nilai AKIP OPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 oleh Tim Evaluator Inpektorat Kabupaten Rokan Hilir mendapat nilai (72,25) dengan predikat BB.

Tabel III.11 Sasaran Strategis 4 UMKM Kabupaten Rokan Hilir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	75,5%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Tabel III.12 Capaian Kinerja Strategis 4 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN %		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	100%	100%	75,5%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

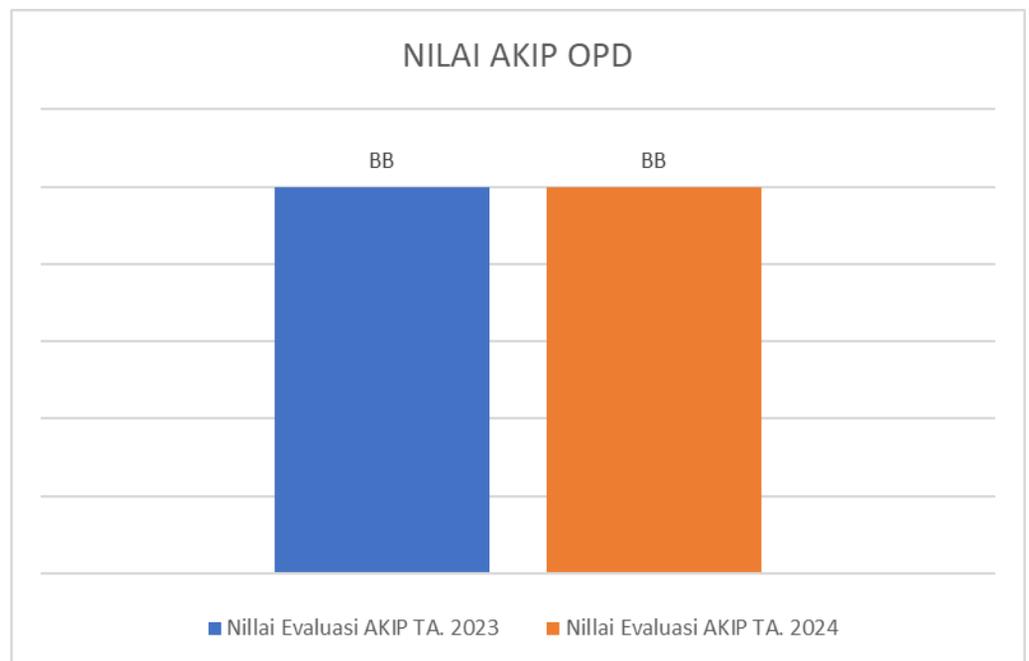
Tabel III.13 Sasaran Strategis 4 Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Dibandingkan Target Akhir Periode Rencana Strategis Kabupaten Rokan Hilir.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	A	BB	75,5%

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Grafik Nilai AKIP OPD Tahun 2024 mendapatkan nilai “BB” sama seperti Nilai AKIP OPD Tahun 2022, tetapi mengalami peningkatan nilai dari 70,83% menjadi 72,50%.

Gambar Grafik III.6 Nilai AKIP OPD



Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Lampiran I). Adapun rencana dan capaian target indikator kinerja dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran II)

C. Realisasi Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6.108.524.200,- pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Pada APBD-P terjadi penambahan anggaran, sehingga menjadi Rp. 7.089.923.251,-. Untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 6.540.223.001,- (92,25%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel III.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

Uraian	Anggaran		Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
1	2	3	4	5	6
Belanja	6.108.524.200	7.089.923.251	6.540.223.001	549.700.250	92,25

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Tabel III.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Per-Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

No	Program	Jumlah (Rp)				Persentase
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	5,115,610,756	6,181,042,648	5,683,750,947	497,291,701	91.95
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	95,158,342	-	-	-	0.00
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAAN	243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	249,978,040	143,503,659	131,264,078	165.000	99.81
Jumlah		6,108,524,200	7,089,923,251	6,540,223,001	549,700,250	92.25

Tabel III.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Per- Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)				Persentase
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140,200,618	140,200,618	139,785,618	415,000	99.70%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,239,116,500	3,825,494,656	3,548,689,086	276,805,570	92.76%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	187,626,000	212,169,000	209,156,732	3,012,268	98.58%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710,892,052	958,087,974	918,039,602	40,048,372	95.82%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176,668,986	106,493,400	33,338,000	73,155,400	31.31%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	437,087,600	714,578,000	624,193,975	90,384,025	87.35%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224,019,000	224,019,000	210,547,934	13,471,066	93.99%
8	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68%
9	Peremberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29%
10	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	249,978,040	143,503,659	131,264,078	12,239,581	91.47%
Jumlah		6,108,524,200	7,089,923,251	6,540,223,001	549,700,250	92.25

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.* Sub kegiatan ini memiliki Indikator hasil sub kegiatan yaitu Laporan RENJA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 29,998,713,- dan terealisasi sebesar Rp. 29,583,713,- (98.62%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 415,000,-
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen RKA dengan Indikator hasil yaitu Laporan RKA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Anggaran untuk sub kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 27,999,877,- dan terealisasi sebesar Rp. 27,999,877,- (100.00%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKPA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan perubahan dokumen RKPA. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah Laporan Perubahan RKPA Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.999,792- dan terealisasi sebesar Rp. 17.999,792,- (100,00%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan dokumen DPA SKPD. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah LaporanP DPA SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 14,202,445,- dan terealisasi sebesar Rp. 14,202,445,- (100,00%).

- *Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD.* Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan dokumen perubahan DPPA SKPD. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah Laporan Perubahan DPPA SKPD Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.999.888,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.999.888,- (100.00%).
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.* Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah adanya laporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2024. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.999.935,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.999.935,- (100.00%).
- *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah terselenggaranya evaluasi dan monitoring program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 19.999.968,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.999.968,- (100.00%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.* Hasil dari sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Pada tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3,798,983,572,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,522,178,002,- (92.71%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 276,805,570,-.
- *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.* Sub kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir selama 1 (satu) tahun. Adapun indikator sub kegiatan adalah Laporan keuangan tahun 2024. Anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 16,477,657,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,447,657,- (100.00%).

- *Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.* Sub Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir. Adapun indikator sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Semesteran SKPD Tahun 2024. Anggaran sebesar Rp. 10,063,427,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,063,427,- (100.00%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah pakaian seragam olahraga, PDH Khaki dan Pakaian Melayu untuk ASN Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 64,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64,000,000,- (100%).
- *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.* Pada tahun 2024 anggaran yang tersedia sebesar Rp. 148,169,000,- dengan target kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/pengembangan wawasan berdasarkan tugas dan fungsi dengan realisasi sebesar Rp. 145,156,732,- (97.97%). Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 3,012,268,-.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah peningkatan kualitas pelayanan kantor khusus pada instalasi listrik/penerangan. Untuk sub kegiatan ini jumlah anggaran pada tahun 2024 sebesar 33.696,570,-. Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 33,370,230,- (99.03%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 326,340,-.
- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.* Indikator hasil sub kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Jumlah anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 84,775,303,-. Realisasi anggaran pada sub

kegiatan ini sebesar Rp 84,239.558,- (99,37%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 535,745,-.

- *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*. Indikator hasil sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Untuk anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 34,285,943,-. Sub kegiatan ini terealisasi sebesar Rp. 34,285,793,- (100,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 150,-.
- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*. Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat rutin dan tamu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 48,856,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 48,856,800,- (100,00%).
- *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*. Target kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Untuk sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terpenuhinya keperluan atas barang cetak dan penggandaan. Untuk tahun 2024 sub kegiatan ini dengan anggaran sebesar Rp. 104,211,436,-. Sub kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp. 67,059,141,- (64,35%). Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.152.295,-.
- *Penyediaan Bahan / Material*. Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya kebutuhan bahan / material, miniatur dan lainnya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27,750,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27,662,000,- (99,68%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 885.000,-.
- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*. Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Dengan terget kinerja Jumlah

pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan perjalanan dinas kedalam dan luar daerah tahun 2024. Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 624,511,922,- Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 622,566,080,- (99.69%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1,945,842,-.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah tersedianya peralatan dan mesin lainnya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Jumlah anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 37,118,400,-. Realisasi pada tahun ini sebesar Rp. 33,338,000,- (89,82%) dan sisa anggaran dari sub kegiatan ini sejumlah Rp. 3,780,400,-.
- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.* Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Untuk anggarannya sebesar Rp. 69,375,000,-. Realisasi kegiatan sebesar Rp 0,-. (0.00%).

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat.* Dari sub kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terjadinya komunikasi yang baik dengan instansi vertikal maupun horizontal tahun 2024. Jumlah anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 9,990,000,-. Realisasi pada tahun ini sebesar Rp. 5,148,000,- (51.53%).
- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.* Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah pembayaran biaya wifi, air dan listrik Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Untuk anggarannya sebesar Rp. 81,240,000,-. Realisasi pada tahun ini sebesar Rp 74,124,575,- (91.24%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7,115,425,-.
- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.* Dari sub kegiatan ini hasil

yang diperoleh adalah tersedianya tenaga cleaning service, penjaga malam, dan tenaga sopir untuk menunjang tugas Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Anggarannya sebesar Rp. 623,348,000,-. Realisasi sub kegiatan ini adalah Rp. 544,921,400,- (87.42%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 78,426,600,-.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.* Dengan indikator kinerja hasil adalah terselenggaranya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan tahun 2024 dan dianggarkan sebesar Rp. 46,530,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41,212,210,- (88.57%). Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 5,317,790,-
- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.* Dengan indikator kinerja hasil adalah terselenggaranya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun 2024 dan dianggarkan sebesar Rp. 82,760,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 75,404,324,- (91,11%). Sisa anggaran dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 7,355,676,-.
- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.* Indikator kinerja hasil yaitu terpeliharanya peralatan kantor. Pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 34.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33,848,400,- (97.77%). Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 771,600,-.
- *Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.* Adapun tujuan pada sub kegiatan ini adalah untuk terpeliharanya gedung kantor atau bangunan kantor lainnya dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 60,109,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 60,083,000,- (99.96%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 26,000,-.

2. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
 - a. **Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kab / Kota**
 - *Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kab / Kota.* Tujuan Pada Sub Kegiatan Ini Adalah Mengawasi Koperasi, Simpan Pinjam / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kab / Kota. Anggaran Pada Sub Kegiatan Sebesar Rp. 0,- dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 0,- (0.00%)
3. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
 - b. **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota**
 - *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.* Tujuan pada sub kegiatan ini adalah melakukan koordinasi kepada pendamping koperasi dilapangan untuk mengetahui perkembangan koperasi. Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp. 361,270,944,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 323,988,944,- (89.68 %).
4. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**
 - a. **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
 - *Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan.* Tujuan pada sub kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan bantuan alat usaha kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp. 404,106,118,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 401,219,032,- (99,29%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2,886,968,-.

5. Program Pengembangan UMKM

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala

Usaha Menjadi Usaha Kecil Usaha Mikro

– *Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.*

Tujuan pada sub kegiatan ini adalah melakukan promosi dan pemasaran dari produk - pelaku usaha Kabupaten Rokan Hilir. Anggaran pada sub kegiatan sebesar Rp. 143,503,659,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 131,264,078,- (91.47%), dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12,239,581

Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang 100%)	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	100%	89,68%	10,32%
		Persentase Koperasi Aktif	100%	89,68%	10,32%
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah omzet usaha (Rupiah)	100%	89,68%	10,32%
	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	100%	99,29%	0,71%
		Jumlah UMKM (Unit)	100%	91,47%	8,53%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	100%	91,95%	8,05%

Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, tercapai tidak lepas dari peran anggaran yang tersedia yang diberikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM yang disusun dalam program dan kegiatan OPD tahun 2024. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Program Pengembangan UMKM

FAKTOR PENUNJANG KEBERHASILAN INDIKATOR KINERJA KOPERSI DAN UMKM

Penunjang Keberhasilan Koperasi

- Adanya Partisipasi Masyarakat Memahami Manfaat Koperasi dan Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Menjalankan Koperasi
- Antusias Masyarakat Tinggi Karna Perhatian Masyarakat tentang Program Program Pemerintah Melalui Koperasi

Penghambat Keberhasilan Koperasi

- Internal : Manajemen yang buruk, Pengelola tidak berjalan dengan baik. Kurang Partisipasi Anggota dalam Perkembangan Koperasi.
- Eksternal : Perubahan Regulasi, yang kurang mendukung Koperasi Sehingga Sulit Berkembang. Kondisi Koperasi yang buruk, Daya beli Masyarakat menurun Mempengaruhi Kinerja Koperasi.

Penunjang Keberhasilan UMKM

- Tersedianya Aplikasi Online Single System (OSS) untuk Pendaftaran Legalitas Usaha yang Dapat dilakukan secara Mandiri.
- Tersedianya Regulasi terkait Pemberdayaan UMKM yang Mengatur Tergantung legalitas UMKM oleh Dinas Teknis yang Membidangi.

Penghambat Keberhasilan UMKM

- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Pelaku UMKM akan Perlunya Izin Berusaha (Legalitas Usaha)

Tabel I.5 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
			ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA	
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,115,610,756	6,181,042,648	5,683,750,947	497,291,701	91,95
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140,200,618	140,200,618	139,785,618	415,000	99.70
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29,998,713	29,998,713	29,583,713	415,000	98.62
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	27,999,877	27,999,877	27,999,877	-	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	17,999,792	17,999,792	17,999,792	-	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	14,202,445	14,202,445	14,202,445	-	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	9,999,888	9,999,888	9,999,888	-	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,999,935	19,999,935	19,999,935	-	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,999,968	19,999,968	19,999,968	-	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,239,116,500	3,825,494,656	3,548,689,086	276,805,570	92.76
		Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	3,212,605,416	3,798,983,572	3,522,178,002	276,805,570	92.71
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	16,447,657	16,447,657	16,447,657	-	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,063,427	10,063,427	10,063,427	-	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		187,626,000	212,169,000	209,156,732	3,012,268	98.58
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	64,000,000	64,000,000	-	100.00
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	187,626,000	148,169,000	145,156,732	3,012,268	97.97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		710,892,052	958,087,974	918,039,602	40,048,372	95.82
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	33,696,570	33,696,570	33,370,230	326,340	99.03

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
			ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA	
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,775,303	84,775,303	84,239,558	535,745	99.37
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,285,943	34,285,943	34,285,793	150	100.00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,436,800	32,536,800	32,536,800	-	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,581,436	104,211,436	67,059,141	37,152,295	64.35
		Penyediaan Bahan/Material	27,750,000	27,750,000	27,662,000	88,000	99.68
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413,946,000	624,511,922	622,566,080	1,945,842	99.69
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		176,668,986	106,493,400	33,338,000	73,155,400	31.31
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,118,400	37,118,400	33,338,000	3,780,000	89.82
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139,550,586	69,375,000	-	69,375,000	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		437,087,600	714,578,000	624,193,975	90,384,025	87.35
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,990,000	9,990,000	5,148,000	4,842,000	51.53
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81,240,000	81,240,000	74,124,575	7,115,425	91.24
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345,857,600	623,348,000	544,921,400	78,426,600	87.42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		224,019,000	224,019,000	210,547,934	13,471,066	99.99
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46,530,000	46,530,000	41,212,210	5,317,790	88.57
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82,760,000	82,760,000	75,404,432	7,355,676	81.11
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,620,000	34,620,000	33,848,400	771,600	97.77
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,109,000	60,109,000	60,083,000	26,000	99.96

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
			ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA	
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			95,158,342	-	-	-	0.00
	Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Daerah Kab/ Kota		95,158,342	-	-	-	0.00
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kab/ kota	95,158,342	-	-	-	0.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAAN			243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasiaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	243,670,944	361,270,000	323,988,944	37,282,000	89.68
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	404,106,118	404,106,000	401,219,023	2,886,968	99.29
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			249,978,040	143,503,659	131,264,078	12,239,581	91.47

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		249,978,040	143,503,659	131,264,078	12,239,581	91.47
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	249,978,040	143,503,659	131,264,078	12,239,581	91.47
Jumlah			6,108,524,200	7,089,923,251	6,540,223,001	549,700,250	92.25

BAB IV

PENUTUP

Sepanjang tahun anggaran 2024 sebagian besar kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil dilaksanakan secara maksimal, namun masih ada beberapa kegiatan yang telah diprogramkan dan dianggarkan tetapi harus dikurangi karena terjadinya efisiensi. Anggaran yang tersedia telah dapat dikelola sebaik mungkin melalui kegiatan yang ada, supaya fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan urusan penunjang di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir kami susun sekiranya dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengukuran kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025.

Bagansiapiapi, Maret 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KABUPATEN : ROKAN HILIR
NAMA SKPD : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA (KUALITATIF)	JUMLAH (Rp)				PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
					ANGGARAN		REALISASI	SISA DANA		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	5,115,610,755	6,181,042,648	5,683,750,947	497,291,701	91.95	
2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	140,200,618	140,200,618	139,785,618	415,000	99.70	
02			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	29,998,713	29,998,713	29,583,713	415,000	98.62	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Bulan	27,999,877	27,999,877	27,999,877	-	100.00	
03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	12 Bulan	17,999,792	17,999,792	17,999,792	-	100.00	
04			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	12 Bulan	14,202,445	14,202,445	14,202,445	-	100.00	
05			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	12 Bulan	9,999,888	9,999,888	9,999,888	-	100.00	

06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	19,999,935	19,999,935	19,999,935	-	100.00	
07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	19,999,968	19,999,968	19,999,968	-	100.00	
2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3,239,116,500	3,825,494,656	3,548,689,086	276,805,570	92.76	
01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,212,605,416	3,798,983,572	3,522,178,002	276,805,570	92.71	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	16,447,657	16,447,657	16,447,657	-	100.00	
05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	10,063,427	10,063,427	10,063,427	-	100.00	
2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	187,626,000	212,169,000	209,156,732	3,012,268	98.58	
02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	-	64,000,000	64,000,000	-	100.00	
09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	187,626,000	148,169,000	145,156,732	3,012,268	97.97	
2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	710,892,052	958,087,974	918,039,602	40,048,372	95.82	
01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	33,695,570	33,695,570	33,370,230	326,340	99.03	
02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	84,775,303	84,775,303	84,239,558	535,745	99.37	
03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	34,285,943	34,285,943	34,285,793	150	100.00	

04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	48,856,800	48,856,800	48,856,800	-	100.00	
05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	67,581,436	104,211,436	67,059,141	37,152,295	64.35	
			Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	27,750,000	27,750,000	27,662,000	88,000	99.68	
09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	413,946,000	624,511,922	622,556,080	1,945,842	99.69	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	176,668,985	106,493,400	33,338,000	73,155,400	31.31	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	37,118,400	37,118,400	33,338,000	3,780,400	89.82	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	139,500,585	69,375,000	-	69,375,000	0.00	
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	437,087,600	714,578,000	624,193,975	90,384,025	87.35	
01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	9,990,000	9,990,000	5,148,000	4,842,000	51.53	
02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	81,240,000	81,240,000	74,124,575	7,115,425	91.24	
04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	345,857,600	623,348,000	544,921,400	78,426,600	87.42	
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	224,019,000	224,019,000	210,547,934	13,471,006	93.99	
01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	46,530,000	46,530,000	41,212,210	5,317,790	88.57	

02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	82,760,000	82,760,000	75,404,324	7,355,676	91.11	
06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	34,620,000	34,620,000	33,848,400	771,600	97.77	
11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	60,109,000	60,109,000	60,083,000	26,000	99.96	
05.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			100%	95,158,342	0	0	0	0	
2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan	95,158,342	0	0	0	0	
05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAAN			100%	243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68	
2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan	243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68	
01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	12 Bulan	243,670,944	361,270,944	323,988,944	37,282,000	89.68	
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			100%	404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29	
2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		12 Bulan	404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29	

01			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	12 Bulan	404,106,118	404,106,000	401,219,032	2,886,968	99.29	
05.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			100%	245,939,659	143,503,659	131,264,078	12,239,581	91.47	
2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		12 Bulan	245,939,659	143,503,659	131,246,087	12,239,581	91.47	
01			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	12 Bulan	245,939,659	143,503,659	131,246,087	12,239,581	91.47	
JUMLAH BELANJA					6,108,524,200	7,089,923,251	6,540,223,001	549,700,250		

Bagansiapiapi, Maret 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KABUPATEN : ROKAN HILIR
NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	8,47%	3,9%	46,04%
		Persentase Koperasi Aktif	81,39%	82,5%	100%
2	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Pertumbuhan Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 147 M	Rp. 186.600.000.000	100%
3	Meningkatnya UMKM yang Berdaya Saing	Jumlah UMKM yang Mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	72	120	100%
		Jumlah UMKM (Unit)	26.003	42.302	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%

Jumlah anggaran tahun 2024 (setelah perubahan) : Rp. 7.089.923.251,-

Jumlah realisasi anggaran tahun 2024 : Rp. 6.540.223.001,-

Bagansiapiapi, Maret 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Museum Ikan Lt. 2
Email : diskopukm@rohilkab.go.id
BAGANSIAPIPI

RENCANA KERJA TANUNAN (RKT) TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	8.47
		Persentase Koperasi Aktif	89.68
2	Meningkatnya Produktifitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 186.600.000.000
3	Meningkatnya UMKM yang berdaya asing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat Setiap Tahunnya (Unit)	87 Unit
		Jumlah UMKM (Unit)	35.068 Unit
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	BB

Bagansiapiapi, Desember 2024



KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR

SRI HASLINA,SH

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP 196711251991032005



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Museum Ikan Lt. 2

Email : diskopukm@rohilkab.go.id

BAGANSIPIAPI

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI HASLINA, SH
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir
Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : AFRIZAL SINTONG
Jabatan : Bupati Rokan Hilir
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Desember 2024

PIHAK KEDUA,
BUPATI ROKAN HILIR,



PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
KABUPATEN ROKAN HILIR,



SRI HASLINA, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19761125 199103 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	8,47%
		Persentase Koperasi Aktif	89,68%
2.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Jumlah Omzet Usaha (Rupiah)	Rp. 186.600.000.000
3.	Meningkatnya UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang mempunyai Legalitas dan Sertifikat setiap tahunnya (Unit)	87 Unit
		Jumlah UMKM (Unit)	35.068 Unit
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Nilai AKIP OPD	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.181.042.648	APBD - P
2.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	361.270.944	APBD - P
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, U	404.106.000	DAK NF
4.	Program Pengembangan UMKM	143.503.659	APBD - P

Bagansiapiapi, - Desember 2024





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 700.1.2.1/P/KE/INSP/2024/60
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Bagansiapiapi, 25 Juni 2024

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir
di-
Bagansiapiapi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024

TRWULAN IV

DINAS KOPERASI DAN UMKM

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Rencana		Realisasi Capaian Kinerja Rencana sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang diawalkan		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Trwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang diawalkan (2024)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja s.d. Tahun 2024/ARs Tahun Pelaksanaan Rencana Tahun 2024)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s.d. Tahun 2024 (%)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Semua Bidang																										
10	Sasaran Prioritas Daerah RB	PROGRAM PENUNJANG ULUSAN PEMBENTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Penyelesaian permohonan peninjauan uraian pembentah daerah Kabupaten Kota (%)	100,00	538.000,000	100,00	-	100	6.181.042.849	611.128.805	1.802.585.835	1.866.990.154	1.813.048.353	-	5.883.750.947	0,00%	91,95%	100,00	5.883.750.947	0,00%	105,45%					
11		Pencanangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyelesaian perencanaan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	-	0,00	-	1	140.200.618	-	-	80.745.970	11.040.000	47.999.848	1	139.785.618	100,00%	99,70%	0,00	139.785.618	0,00%	0,00%					
12		Pengurusan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang diajukan (Dokumen)	-	0,00	-	1	29.998.713	-	-	18.543.713	11.040.000	-	1	29.983.713	100,00%	98,62%	1,00	29.983.713	0,00%	0,00%					
13		Koordinasi dan Pengurusan Dokumen RRA-SVPD	Jumlah Dokumen RRA-SVPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Dokumen RRA-SVPD (Dokumen)	-	0,00	-	1	27.999.877	-	-	27.999.877	-	-	1	27.999.877	100,00%	100,00%	1,00	27.999.877	0,00%	0,00%					
14		Koordinasi dan Pengurusan Dokumen Perubahan RRA-SVPD	Jumlah Dokumen Perubahan RRA-SVPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Dokumen Perubahan RRA-SVPD (Dokumen)	-	0,00	-	1	17.999.792	-	-	-	-	1	17.999.792	100,00%	100,00%	1,00	17.999.792	0,00%	0,00%						
15		Koordinasi dan Pengurusan DPA-SVPD	Jumlah Dokumen DPA-SVPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Dokumen DPA-SVPD (Dokumen)	-	0,00	-	1	14.202.445	-	-	14.202.445	-	-	1	14.202.445	100,00%	100,00%	1,00	14.202.445	0,00%	0,00%					
16		Koordinasi dan Pengurusan Perubahan DPA-SVPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SVPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Dokumen Perubahan DPA-SVPD (Dokumen)	-	0,00	-	1	9.999.888	-	-	-	-	1	9.999.888	100,00%	100,00%	1,00	9.999.888	0,00%	0,00%						
17		Koordinasi dan Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Hasil Kinerja SVPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Monev Hasil Kinerja SVPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Hasil Kinerja SVPD (Laporan)	-	0,00	-	3	19.999.935	-	-	19.999.935	-	-	3	19.999.935	100,00%	100,00%	3,00	19.999.935	0,00%	0,00%					
18		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	0,00	-	1	19.999.988	-	-	-	-	1	19.999.988	100,00%	100,00%	1,00	19.999.988	0,00%	0,00%						
19		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah (1)	-	0,00	-	1	3.825.404.858	-	403.321.103	1.095.577.883	1.085.496.450	964.203.850	-	3.548.889.086	0,00%	92,78%	0,00	3.548.889.086	0,00%	0,00%					
20		Pemecahan Guy dan Lumpuran ADN	Jumlah Orang yang Menereka Guy dan Lumpuran ADN (Orang/bulan)	-	0,00	-	28	3.798.983.572	28	403.321.103	28	1.075.433.023	28	947.845.993	28	3.522.178.002	100,00%	92,71%	28,00	3.522.178.002	0,00%	0,00%				
21		Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Abta Tahun SVPD	Jumlah Laporan Laporan Keuangan Abta Tahun SVPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Abta Tahun SVPD (Laporan)	-	0,00	-	1	16.447.857	-	-	-	-	1	16.447.857	100,00%	100,00%	1,00	16.447.857	0,00%	0,00%						

21		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan A/R Tahun SWPD	"Jumlah Laporan Keuangan A/R Tahun SWPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan A/R Tahun SWPD (Laporan)				0,00	-	1	16.447.857	-	-	-	-	1	16.447.857	1	16.447.857	100,00%	100,00%	1,00	16.447.857	0,00%	0,00%
22		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SWPD	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SWPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SWPD (Laporan)				0,00	-	1	10.063.427	-	-	-	1	10.063.427	1	10.063.427	100,00%	100,00%	1,00	10.063.427	0,00%	0,00%	
23		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti bentuk implementasi pelaksanaan penunjang, undangan, pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (1)			538.980.000	0,00	-	1	212.189.000	88.131.732	13.800.000	21.400.000	108.025.000	1	209.158.732	100,00%	98,58%	0,00	209.158.732	0,00%	83,61%		
24		Pengadaan Paket/ Paket Dasar/ Abad/ Kembang/ Pajale	"Jumlah Paket/ Paket Dasar/ Abad/ Kembang/ Pajale"			133.980.000	0,00	-	32	84.000.000	-	-	-	-	32	84.000.000	32	84.000.000	100,00%	100,00%	32,00	84.000.000	0,00%	47,77%
25		Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%		
26		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (On/Off)	"Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (On/Off)"			405.000.000	0,00	-	18	148.189.000	88.131.732	13.800.000	21.400.000	44.025.000	18	145.158.732	100,00%	97,91%	18,00	145.158.732	0,00%	35,84%		
27		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah (1)			-	0,00	-	1	988.087.014	89.098.761	221.030.588	207.897.154	309.313.099	1	918.039.802	100,00%	95,82%	0,00	918.039.802	0,00%	0,00%		
28		Pengadaan Komponen Inbalok Lantai/Perengkapan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket/ Komponen Inbalok Lantai/Perengkapan Bangunan Kantor yang Diwujudkan (Paket)"			-	0,00	-	1	33.696.570	7.988.770	-	18.225.425	1	9.178.035	1	33.370.230	100,00%	99,03%	1,00	33.370.230	0,00%	0,00%	
29		Pengadaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	"Jumlah Paket/ Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Diwujudkan (Paket)"			-	0,00	-	1	84.775.303	21.354.410	19.878.288	21.851.837	1	21.355.223	1	84.239.558	100,00%	99,31%	1,00	84.239.558	0,00%	0,00%	
30		Pengadaan Perakitan Rumah Tangga	"Jumlah Paket/ Perakitan Rumah Tangga yang Diwujudkan (Paket)"			-	0,00	-	1	34.285.943	8.835.950	-	18.847.719	1	8.802.124	1	34.285.793	100,00%	100,00%	1,00	34.285.793	0,00%	0,00%	
31		Pengadaan Bahan Logistik Kantor	"Jumlah Paket/ Bahan Logistik Kantor yang Diwujudkan (Paket)"			-	0,00	-	1	48.858.800	12.214.200	12.214.200	12.214.200	1	12.214.200	1	48.858.800	100,00%	100,00%	1,00	48.858.800	0,00%	0,00%	
32		Pengadaan Barang Cetak dan Penggantian	"Jumlah Paket/ Barang Cetak dan Penggantian yang Diwujudkan (Paket)"			-	0,00	-	1	104.211.438	12.158.931	-	33.356.705	1	21.545.505	1	87.050.141	100,00%	84,35%	1,00	87.050.141	0,00%	0,00%	
33		Pengadaan Bahan Material	"Jumlah Paket/ Bahan Material yang Diwujudkan (Paket)"			-	0,00	-	1	27.750.000	-	-	-	1	27.882.000	1	27.882.000	100,00%	99,88%	1,00	27.882.000	0,00%	0,00%	
34		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD (Laporan)	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD (Laporan)"			-	0,00	-	200	624.511.922	28.570.560	189.838.100	197.401.488	200	208.756.012	200	622.588.080	100,00%	99,89%	200,00	622.588.080	0,00%	0,00%	
35		Perakuisisian A/R Dinamis SWPD	"Jumlah Dokumen Perakuisisian A/R Dinamis SWPD (Dokumen)"			-	0,00	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
36		Pengadaan Barang Milik Daerah/Perangko Usahan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Perencanaan Desa/ Jabatan, Operasi/ atau layanan, pengadaan peralihan gedung kantor per paduan antara dan peralihan pendukung gedung kantor atau bangunan (DUS)			-	0,00	-	95	108.493.400	-	-	33.338.000	-	1	33.338.000	0,53%	31,31%	0,00	33.338.000	0,00%	0,00%		
37		Pengadaan Perencanaan Perancangan Desain/ Jabatan Kantor/ Dinas/ Kabupaten yang Diwujudkan (Undi)	"Jumlah Undi/ Perencanaan Perancangan Desain/ Jabatan Kantor/ Dinas/ Kabupaten yang Diwujudkan (Undi)"			-	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

38		Penyelesaian Perencanaan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Undi Perencanaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihasilkan (Undi)		0,00		1	37.118.400					1	33.338.000			1	33.338.000	100,00%	89,82%	1,00	33.338.000	0,00%	0,00%
39		Penyelesaian Peralihan dan Melebi Lainnya	*Jumlah Undi Peralihan dan Melebi Lainnya yang Dihasilkan (Undi)		0,00		7	69.375.000											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
40		Penyelesaian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Undi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan (Undi)		0,00		1												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
41		Penyelesaian Jasa Peninggang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersebutnya kebutuhan jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air dan lain-lain. Kebutuhan jasa telegrafan kantor, jasa telepon kantor, jasa sistem basis perkomputeran, jasa xcopy kantor (1)		0,00		1	714.578.000	-	18.343.209	-	183.090.794	-	148.190.550	-	276.869.422	1	824.193.975	75,00%	87,35%	0,00	824.193.975	0,00%	0,00%
42		Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0,00		21	9.980.000	1	103.000	4	1.000.000	4	1.000.000	5	3.045.000	14	5.148.000	86,67%	51,53%	14,00	5.148.000	0,00%	0,00%
43		Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan (Laporan)		0,00		3	81.240.000	-	18.240.209	-	17.205.194	-	18.515.550	3	20.163.822	3	74.124.575	100,00%	91,24%	3,00	74.124.575	0,00%	0,00%
44		Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan (Laporan)		0,00		21	623.348.000	21	-	21	164.889.800	21	128.675.000	21	253.380.800	21	544.921.400	100,00%	87,42%	21,00	544.921.400	0,00%	0,00%
45		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peninggang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersebutnya jumlah perencanaan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan bersumber dari Anggaran Administrasi Perencanaan Dinas Jabatan. Jumlah perencanaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan bersumber dari Anggaran Administrasi Perencanaan Dinas operasional atau lapangan (1)		0,00		1	224.019.000	-	34.232.000	-	7.640.400	-	61.828.000	-	108.847.534	1	210.547.934	100,00%	93,90%	0,00	210.547.934	0,00%	0,00%
46		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perencanaan Perencanaan Dinas atau Perencanaan Dinas Jabatan	*Jumlah Perencanaan Perencanaan Dinas atau Perencanaan Dinas Jabatan yang Dihasilkan dan dibayarkan (Pajale) (Undi)		0,00		1	48.530.000	-	12.832.000	-	-	-	1	28.580.210	1	41.212.210	100,00%	88,57%	1,00	41.212.210	0,00%	0,00%	
47		Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perencanaan Perencanaan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Perencanaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihasilkan dan dibayarkan (Pajak dan Perencanaan) (Undi)		0,00		17	82.760.000	-	11.900.000	-	732.000	-	18.148.000	17	44.824.324	17	75.404.324	100,00%	91,11%	17,00	75.404.324	0,00%	0,00%
48		Pemeliharaan Peralihan dan Melebi Lainnya	*Jumlah Peralihan dan Melebi Lainnya yang Dihasilkan (Undi)		0,00		50	34.820.000	-	9.700.000	-	6.908.400	-	2.750.000	50	14.460.000	50	33.848.400	100,00%	97,77%	50,00	33.848.400	0,00%	0,00%
49		Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan (Fasilitas) (Undi)		0,00		1	60.109.000	-	-	-	-	-	1	19.153.000	1	60.083.000	100,00%	99,98%	1,00	60.083.000	0,00%	0,00%	
50																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98,82%	91,95%			
51																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

70		Pendidikan dan Latihan Perencanaan Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan jumlah anggota koperasi yang lebih banyak Pendidikan dan Latihan Perencanaan bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah (%)			0,00		98,9	361.270.944				114.791.844		88.200.000		120.997.100		323.988.944	0,00%	89,88%	0,00	323.988.944	0,00%	0,00%		
71		Pengalihan Pemahaman dan Pengalihan Perencanaan serta Kepadatan Kompetensi SDM Koperasi	“Jumlah SDM yang Menerima Pengalihan Perencanaan (Orang)”			0,00		80	361.270.944	20		20	114.791.844	20	88.200.000	20	120.997.100	80	323.988.944	100,00%	89,88%	80,00	323.988.944	0,00%	0,00%		
72																				100,00%	89,88%						
73																											
74		PROGRAM PEMBEDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERIAS																									
75		Pemberdayaan dan Perlebaran Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perolehan koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlebaran Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (0,52)			0,00		92												0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
76		Pengalihan Proccedure, Nilai Tambah, Akae Poser, Akae Pembayasan, Pengalihan Kelembagaan, Peralihan Manajemen, Sertifikasi dan Penilaian Kinerja Usaha	“Jumlah Unit Usaha yang Proccedure, Nilai Tambah, Akae Poser, Akae Pembayasan, Pengalihan Kelembagaan, Peralihan Manajemen, Sertifikasi dan Penilaian Kinerja Usaha (Unit Usaha)”			0,00		100													0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
77																											
78																											
79		PROGRAM PEMBEDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang Mengikuti Wirausaha (%)	93,60		96,00		94	404.106.000			138.904.672		193.481.156		68.833.204		401.219.032		0,00%	99,29%	91,00	401.219.032		0,00%		
80		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kampanye, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Perolehan koperasi yang diberikan Pemberdayaan dan Perlebaran Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota (0,52)			0,00		92	404.106.000			138.904.672		193.481.156		68.833.204		401.219.032		0,00%	99,29%	0,00	401.219.032	0,00%	0,00%		
81		Pemberdayaan melalui Pembiayaan Usaha Mikro	“Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Pembiayaan Usaha Mikro (Unit Usaha)”			0,00		30													0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
82		Fasilitas Pemecahan Perizinan Usaha Mikro	“Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mencapai Perizinan (Unit Usaha)”			0,00		100													0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
83		Pemberdayaan Kelembagaan Pdam dan Pengembangan Usaha Mikro	“Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Penguatan Usaha Mikro (Unit Usaha)”			0,00		22													0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
84		Pengalihan Pemahaman dan Pengalihan UMMI serta Kepadatan Kompetensi UMMI dan Kelembagaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	“Jumlah UMMI yang Menerima Pengalihan UMMI dan Kelembagaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Orang)”			0,00		120	404.106.000			60	138.904.672		193.481.156		68.833.204		120	401.219.032	100,00%	99,29%	120,00	401.219.032	0,00%	0,00%	
85																											
86																											
87		PROGRAM PENGEMBANGAN UMMI							143.503.659				17.497.233		113.766.845							131.264.078		91,41%		131.264.078	0,00%
88		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mengikuti Usaha Kecil	Perolehan UMMI yang diberikan dengan dan pelatihan (0,55)			0,00		95	143.503.659				17.497.233		113.766.845						0,00%	91,41%	0,00	131.264.078	0,00%	0,00%	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : / SK / K. UMKM 2024
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN SASARAN					
						2022	2023	2024	2025	2026	Target Kinerja Akhir Periode
1	Terwujudnya Koperasi yang Maju dan Modern	meningkatkan Kualitas Koperasi	Persentase koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah seluruh Sehat}} \times 100\%$	n/a	7.74	7.99	8.47	8.95	9.68	9.68
			Persentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	n/a	78.54	79.71	81.39	83.33	85.5	85.5
		meningkatkan produktifitas koperasi	Jumlah omzet usaha (rupiah)	Jumlah omzet usaha per tahun	Rp. 140 M	Rp. 145 M	Rp. 147 M	Rp. 151 M	Rp. 158 M	Rp. 160 M	Rp. 160 M
2	Terwujudnya UMKM Berdaya saing Global	meningkatkan UMKM yang berdaya saing	Persentase peningkatan UMKM yang mempunyai legalitas dan sertifikat setiap tahunnya (Unit)	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang memiliki sertifikat tahun berjalan}}{\text{Jumlah UMKM yang memiliki Sertifikat tahun sebelumnya}} \times 100\%$	60	65	70	72	75	80	80
			Jumlah UMKM (Unit)	Jumlah UMKM per tahun	23.003	24.003	25.003	26.003	27.003	28.003	28.003
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Mengkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP DPD	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	B	BB	BB	BB	BB	A	A

